

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) DI SMK NEGERI PARUNGPONTENG KABUPATEN TASIKMALAYA

Meita Yelia Rahmi

Program Magister Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *meitayeliarahmi@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BKK di SMK Negeri Parungponteng diimplementasikan, dampaknya terhadap siswa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait kebijakan BKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BKK di SMK Negeri Parungponteng telah memberikan dampak positif terhadap persiapan siswa untuk memasuki dunia kerja, serta telah adanya kerjasama antara sekolah dengan industri, penyelenggaraan pelatihan kerja, serta penyediaan informasi lowongan pekerjaan menjadi faktor utama keberhasilan implementasi BKK. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti minimnya partisipasi industri, kurangnya pemahaman siswa tentang proses seleksi pekerjaan, dan kendala infrastruktur yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan kegiatan BKK.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bursa Kerja Khusus

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Salah satu elemen penting dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri adalah Bursa Kerja Khusus (BKK). BKK menjadi jembatan vital antara sekolah dan dunia kerja, memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pengalaman praktik dan memperoleh informasi mengenai peluang pekerjaan yang tersedia. SMK Negeri Parungponteng, yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, memahami pentingnya kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, sehingga implementasi kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap lulusan memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri yang relevan dan dapat dengan lancar menyelaraskan pengetahuan teoritis dengan aplikasi praktis.

Bursa Kerja Khusus (BKK) di tingkat SMK sebagai sebuah kegiatan yang umumnya diselenggarakan untuk memfasilitasi pertemuan antara para siswa SMK dengan dunia industri. Tujuan dari BKK ini yaitu untuk memudahkan siswa SMK dalam mencari informasi tentang pekerjaan atau magang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dasar hukum dalam pelaksanaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di tingkat SMK yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan SMK dan Pembinaan Tenaga Kerja Dalam Negeri No. Kep-49/ DPPTKDN / 2003 Tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus.

Pengertian kebijakan sendiri menurut Anderson (Wahab, 2008) dengan mengemukakan: "Kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu". Setiap kebijakan perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuannya, sehingga menurut implementasi kebijakan dikemukakan oleh Metter dan Horn (Agustino, 2008) menyatakan: "Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

Implementasi kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh suatu negara atau pemerintah. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tidak hanya tergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan efektif dan efisien di lapangan. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang diusulkan Edwards III (Kusnandar, 2012) terdiri dari empat faktor, yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

Bursa Kerja Khusus merupakan suatu upaya untuk membantu siswa SMK menghadapi dunia kerja dengan menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan, dan berbagai kesempatan karir. Melalui implementasi Kebijakan Bursa Kerja Khusus ini, SMK Negeri Parungponteng berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademis dan teknis, tetapi juga siap secara profesional dan memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dengan langkah-langkah ini, SMK Negeri Parungponteng menjadi lembaga pendidikan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan industri dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari implementasi kebijakan BKK di SMK Negeri Parungponteng, diantaranya melalui penyelarasan kurikulum, dimana dalam implementasi BKK di SMK Negeri Parungponteng mencakup penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Ini melibatkan pembaruan materi pelajaran, penambahan keterampilan praktis, dan integrasi teknologi terkini untuk menghasilkan lulusan yang relevan dan siap untuk terjun langsung ke dunia kerja. Melalui BKK, SMK Negeri Parungponteng menyediakan program pendampingan karier yang membantu siswa dalam memahami pilihan karier yang sesuai dengan

minat dan potensi mereka. Hal ini membantu siswa untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai pilihan pendidikan lanjutan atau memasuki dunia kerja.

Bursa Kerja Khusus (BKK) dilaksanakan melalui kerja sama dengan industri, yang dilakukan melalui olaborasi yang erat dengan perusahaan-perusahaan lokal dan regional menjadi inti dari implementasi BKK. SMK Negeri Parungponteng menjalin kemitraan dengan berbagai industri untuk memberikan pengalaman praktik, magang, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain keterampilan teknis, BKK di SMK Negeri Parungponteng menekankan pengembangan soft skills, yang mencakup keterampilan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan adaptabilitas, yang merupakan aspek-aspek penting dalam mencapai keberhasilan di lingkungan kerja. Sistem pemantauan alumni yang efektif diimplementasikan untuk melacak perkembangan karier setiap lulusan, yang membantu dalam mengevaluasi kesuksesan kebijakan BKK dan menyempurnakan program-program yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan tentang BKK sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi disposisi dan struktur birokrasi, namun demikian faktor komunikasi dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakannya (Najwa, 2020). Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan dengan adanya program BKK telah mampu menempatkan lulusan untuk bekerja dengan persentase lebih dari 60%, meskipun masih adanya kendala manajerial seperti pendanaan, personel, komunikasi dan promosi (Sukardi dan Hargiyanto, 2017). Sementara penelitian lainnya menunjukkan keberhasilan BKK dapat ditunjang oleh kelengkapan fasilitas BKK, penelusuran tamatan, proses rekrutmen yang terbuka serta kemitraan dengan IDUKA yang berkelanjutan (Widiyarso dan Sutama, 2021).

Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya penting dilakukan dalam upaya menganalisis tantangan, hambatan dan dukungan terhadap implementasi kebijakan BKK apakah telah mencapai tujuan yang diinginkan, apakah kebijakan ini berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dalam dunia kerja atau memberikan mereka peluang yang lebih baik untuk melanjutkan ke dunia kerja setelah lulus. Disamping itu melalui penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi area di mana implementasi kebijakan BKK dapat ditingkatkan. Apakah ada hambatan atau kendala tertentu yang dapat diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas BKK di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa kepentingan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan dan peluang karir para siswa SMK. Melalui implementasi BKK seharusnya memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Melalui penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini berhasil dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi siswa, serta dapat dievaluasi sejauh

mana kurikulum di SMK Negeri Parungponteng telah disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

METODE

Metode penelitian untuk mengkaji implementasi Kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya. Penggunaan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang makna, konteks, dan kompleksitas suatu masalah atau fenomena.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan orang-orang yang memiliki informasi dan dapat dipercaya. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahapan:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu tahap penting dalam analisis data. Proses ini melibatkan penyederhanaan, pengorganisasian, dan pengelompokan data kualitatif yang telah dikumpulkan agar dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah dan fokus. Reduksi data bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang muncul dari data kualitatif tersebut.

2. Display data

Display data merupakan cara peneliti menyajikan atau menampilkan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Display data menjadi penting karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan temuan-temuan atau pola-pola yang muncul dari analisis data kualitatif tersebut. Display data dapat mengambil berbagai bentuk, tergantung pada metode penelitian dan preferensi peneliti.

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan dua proses kognitif yang sering digunakan dalam berpikir kritis dan ilmiah. Kedua proses ini memiliki peran penting dalam mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang informasional atau ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, proses verifikasi dan penarikan kesimpulan bersifat iteratif dan interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Parungponteng tidak hanya sebatas pada mencetak dan menghasilkan lulusan sebagai calon tenaga kerja, tetapi bisa berusaha mempersiapkan dan menyalurkan lulusan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Setiap siswa dibekali dengan yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI). BKK SMK Negeri Parungponteng secara garis besar mempunyai beberapa program, yaitu memberikan informasi peluang kerja kepada lulusan, membina dan membimbing siswa memasuki dunia kerja, menyalurkan dan

menempatkan lulusan ke dunia kerja membuka Link and Match dengan lembaga pengguna lulusan serta membina kerja sama dengan pihak pencari kerja untuk mengetahui kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja sekarang. Sehingga BKK SMK Negeri Parungponteng bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Tasikmalaya dan beberapa DU/DI untuk membantu persiapan dan penyaluran lulusan masuk dunia kerja.

Data ini diperoleh dari siswa kelas XII SMK Negeri Parungponteng Tahun 2022/2023 kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Pemasaran, Perbankan dan Keuangan Mikro (PKM) dan Tata Busana berjumlah 223 orang.

Tabel 1. Keadaan Jumlah Siswa

Jumlah Peserta Didik Kelas XII				Total Peserta Didik
TKJ	TBSM	PKM	TB	
100	65	38	20	223

Sumber: SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, 2023

Keberhasilan implementasi kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai aspek seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi Kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya. Dengan memprioritaskan komunikasi yang baik, implementasi kebijakan BKK di SMK Negeri Parungponteng dapat berjalan lebih lancar dan efektif, memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan mendukung tujuan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Komunikasi yang efektif membantu dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat, termasuk siswa, guru, orang tua, dan stakeholder lainnya. Pemahaman bersama tentang tujuan, proses, dan manfaat BKK akan meningkatkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak. Komunikasi sebagai sarana utama untuk menyampaikan kebijakan BKK kepada semua pihak terkait. Ini termasuk aturan, prosedur, dan manfaat yang terkait dengan penerapan BKK di SMK Negeri Parungponteng. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak dapat memahami peran mereka dan kontribusi dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Komunikasi yang efektif dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya BKK dalam membantu mereka mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Dengan menyoroti manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh BKK, siswa akan lebih termotivasi untuk aktif terlibat dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Implementasi BKK melibatkan kerjasama erat dengan dunia usaha dan industri. Komunikasi yang baik antara sekolah dan perusahaan akan memudahkan koordinasi, membangun kemitraan, dan memastikan bahwa kebutuhan pasar kerja terpenuhi. Informasi mengenai kebutuhan industri, jenis pekerjaan yang dibutuhkan,

dan keterampilan yang diinginkan dapat disampaikan dengan lebih efektif melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi yang terbuka memungkinkan adanya saluran umpan balik dari semua pihak terlibat. Umpan balik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan BKK dan membuat perubahan yang diperlukan agar program tersebut lebih berhasil. Implementasi kebijakan BKK mungkin melibatkan perubahan dalam pola pikir dan tindakan. Komunikasi yang efektif membantu dalam mengelola perubahan ini dengan memberikan pemahaman yang cukup kepada semua pihak, sehingga akan lebih menerima dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi dalam implementasi kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya sudah berjalan dengan cukup baik sehingga dalam mengimplementasikannya dapat berjalan dengan cukup baik.

Sumber daya memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, atau di manapun. Sumber daya mencakup berbagai elemen yang mendukung proses ini, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Dengan memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya ini dengan baik, SMK Negeri Parungponteng dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan BKK, membantu siswa dalam mempersiapkan diri untuk dunia kerja, dan memfasilitasi integrasi yang lebih baik antara pendidikan dan pasar kerja. Ketersediaan guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dapat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan BKK, yang dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan pemahaman tentang persyaratan pasar kerja.

Adapun tenaga kependidikan di lingkungan SMK Negeri Parungponteng berjumlah 26 orang, dari 26 tenaga kependidikan SMK Negeri Parungponteng, 1 orang diantaranya berkualifikasi Pendidikan Magister (S2), sementara 15 orang lainnya berkualifikasi Sarjana (S1), 1 orang berkualifikasi Diploma (D1), 8 orang berkualifikasi SMA dan 1 orang berkualifikasi SMP. Dari jumlah 26 orang tenaga pendidikan tersebut, dari status kepegawaian tenaga kependidikan dari jumlah tersebut adalah 4 orang berstatus PNS dan sisanya berstatus Non-PNS. Selanjutnya dari data yang diperoleh menunjukkan jumlah tenaga pendidik di SMK Negeri Parungponteng adalah 41 orang pegawai, dimana para pegawai tersebut memiliki beragam latar belakang Pendidikan dari kualifikasi SLTA dan S1.

Implementasi kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya memerlukan sikap dan langkah-langkah tertentu untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Sikap yang kuat dan tekad untuk menjalankan kebijakan BKK dengan sungguh-sungguh. Selain sikap perlu adanya kepemimpinan yang efektif dari pihak sekolah untuk membimbing dan memastikan pelaksanaan BKK sesuai dengan rencana. Disamping itu pentingnya Kemampuan untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua,

dan perusahaan mitra, serta perlunya membentuk tim kerja yang solid dan melakukan kerjasama yang baik diantara sesama anggotanya.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu struktur organisasi dan SOP (Standard Operating Procedure) dimana memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya. Struktur organisasi yang jelas dan SOP yang terdefinisi dengan baik membantu menciptakan keteraturan dalam operasional BKK. Setiap unit atau divisi dalam struktur memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing yang terdokumentasi dalam SOP. Struktur organisasi yang baik memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar unit terkait di BKK, hal tersebut sangat penting untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan.

Struktur organisasi membantu menetapkan tanggung jawab masing-masing anggota tim atau unit terkait dengan BKK, sedangkan SOP membantu menguraikan langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya SOP, proses operasional dapat dilakukan dengan lebih efisien karena setiap langkahnya sudah terdokumentasi dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko kesalahan. SOP membantu dalam menetapkan standar kualitas pelayanan yang harus dipertahankan. Dengan demikian, BKK dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa dan perusahaan yang bekerja sama. Struktur organisasi dan SOP membantu menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam kegiatan BKK. Semua pihak terlibat dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat akuntabilitas.

Struktur organisasi yang baik dan SOP yang sesuai membantu memastikan bahwa kebijakan BKK di SMK Negeri Parungponteng selaras dengan kebijakan pusat dan regulasi yang berlaku. Dengan struktur yang baik, alokasi sumber daya, seperti personel dan anggaran, dapat dikelola secara efektif. SOP membantu menghindari pemborosan sumber daya dengan menetapkan prosedur yang efisien. Dengan menjaga keteraturan operasional, kolaborasi yang baik, dan peningkatan kualitas pelayanan, struktur organisasi dan SOP menjadi fondasi penting dalam implementasi kebijakan BKK di SMK Negeri Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan pentingnya struktur birokrasi yang terdiri dari ketersediaan organisasi dengan struktur yang jelas disertai dengan adanya SOP untuk menunjukkan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum implementasi kebijakan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perbaikan diantaranya Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi komunikasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu, disamping perlu adanya evaluasi terkait alokasi sumberdaya agar dapat memenuhi kebutuhan

yang terus berkembang seiring waktu. Sikap dan motivasi pelaksana kebijakan, termasuk guru dan staf BKK, memainkan peran kunci dalam kesuksesan implementasi, sehingga perlu dilakukan penilaian rutin terhadap kepuasan dan kinerja pelaksana untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan. Struktur birokrasi yang efisien dan mendukung memfasilitasi implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik antar unit dan tingkatan dalam SMK Negeri Parungponteng memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran program BKK. Diperlukan pengembangan kebijakan internal yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan pendidikan dan industri dapat membantu meningkatkan daya saing siswa

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Najwa Nursyariyah, dkk. (2020). *Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Tentang Bursa Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Sukardi dan Hargiyanto (2017). *Peran Bursa Kerja Khusus Sebagai Upaya Penempatan Lulusan SMK Dalam Rangka Terwujudnya Link And Match Antara Sekolah Dengan Dunia Industri*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Widiyarso dan Utama. (2021). *Strategi Dan Kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) Dalam Mengantar Alumni Mendapat Pekerjaan di DMK Negeri 1 Bulukerto*. Universitas Muhammadiyah Surakarta